

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan infrastruktur transportasi yang sangat penting bagi manusia. Melalui jalan, manusia dapat berpindah maupun memindahkan barang, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Jalan menghubungkan suatu komunitas masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah lain. Penyediaan infrastruktur jalan seperti pada Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan, peran jalan dijelaskan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jalan juga dijelaskan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa antar kota dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran lain dari jalan yaitu merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah dalam suatu negara (Soemardi dan Reini D, 2009).

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).

Masalah infrastruktur seringkali disebut sebagai penghambat investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan

prasarana infrastruktur sudah berlangsung cukup lama di Indonesia dan investasi yang dikeluarkan pun besar, namun masih banyak masalah yang dialami di negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kualitas yang belum mencukupi dan kualitas yang rendah. Anggaran infrastruktur setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi penelitian dari *World Economic Forum* menunjukkan peringkat kualitas infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah. Pentingnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur namun masih ada kendala yang harus dihadapi daerah maupun negara lebih kepada persoalan ekonomi yaitu bagaimana memastikan baiknya infrastruktur supaya lebih bermanfaat (*World Economic Forum* 2018).

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sumber pendanaan utama yang mendukung pembangunan infrastruktur ini. DAU dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Pemanfaatan DAU di Sumatera Selatan diarahkan untuk memperbaiki kualitas jalan dan jembatan, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain DAU, proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Kayuagung-Palembang dan proyek preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera juga menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di provinsi ini, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan berbagai pihak. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan didukung oleh Alokasi dana dari DAU dan sumber lain, serta program strategis nasional yang terintegrasi, menghasilkan peningkatan kualitas jalan dan

jembatan yang signifikan selama 2019-2023 dan mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi regional.

Palembang adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan telah mengalami transformasi yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir. Karena pertumbuhan penduduk yang signifikan, dinamika perekonomian yang muncul, dan keberhasilan berbagai program pembangunan, Sumatera Selatan telah memosisikan diri sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik terpenting di Sumatera Selatan (Utami et al., 2023 : 125).

Selain itu, DAU juga membantu menopang keuangan daerah. Halim (2014) mengemukakan bahwa dana transfer jangka panjang yang berupa DAU memiliki pengaruh positif dengan belanja modal dan jika adanya penurunan dalam dana transfer dapat menimbulkan pengurangan bagi pengeluaran belanja modal. Kelayakan dan keberadaan infrastruktur menjadi suatu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan penghubung antar aktivitas ekonomi (Purwoto dan Kurniawan, 2009). Jika suatu daerah terdapat sarana infrastruktur yang rendah dan infrastruktur yang tidak terawat, maka dibutuhkan belanja modal yang lebih besar untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di daerah tersebut.

DAU merupakan penerimaan dari APBN yang telah disalurkan kepada daerah sehingga kemampuan keuangannya kurang lebih sama untuk keperluan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, pemerintah pusat mengirimkan pendanaan kepada

pemerintah daerah dari APBN untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya tumbuh dan berkembang, pendanaan ini berasal dari DAU (Pratiwi, 2007).

Belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang pengAlokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana Alokasi umum (DAU).

Tabel 1.1
Dana Alokasi Umum di Sumatera Selatan Periode 2006-2023

No	Tahun	Dana Alokasi Umum
1.	2019	1.743.742.960
2.	2020	1.568.602.615
3.	2021	1.563.041.278
4.	2022	1.563.041.287
5.	2023	1.653.643.970

Sumber: Badan Pusat Statitisk

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) di Sumatera Selatan tahun 2019-2020 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu DAU merupakan dana dari pemerintah pusat yang diAlokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga Alokasi DAU mengikuti perubahan APBN dan kebutuhan fiskal daerah. Peningkatan DAU juga terkait dengan upaya pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan dan mendukung belanja modal daerah, yang berpengaruh positif terhadap

pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Secara umum, DAU di Sumatera Selatan selama periode tersebut menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif namun dominan meningkat, terutama di kota-kota besar seperti Palembang.

Turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) di Sumatera Selatan tahun 2021-2022 disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu *Refocusing* anggaran oleh pemerintah pusat selama pandemi COVID-19 yang mengakibatkan Alokasi DAU berkurang karena dana dialihkan untuk penanganan pandemi. Dampak pandemi menyebabkan ketidakpastian fiskal dan perlambatan ekonomi yang mempengaruhi Alokasi anggaran pusat ke daerah, termasuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan masih cukup bergantung pada dana transfer dari APBN, sehingga perubahan kebijakan pusat sangat berdampak pada besaran DAU yang diterima daerah.

Naiknya Dana Alokasi Umum (DAU) di Sumatera Selatan tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu pemerintah pusat meningkatkan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumatera Selatan sebesar 6,98% pada 2024 dibanding 2023, dengan kenaikan DAU sekitar Rp1,27 triliun sebagai bagian dari TKD. Pemulihan ekonomi Sumatera Selatan yang terus membaik pada 2023 dengan pertumbuhan pendapatan negara yang signifikan juga mendorong peningkatan Alokasi dana dari pusat. Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk belanja modal dan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan dana ke daerah termasuk Sumatera Selatan. Secara ringkas, kenaikan DAU di Sumatera Selatan tahun 2023 terutama karena peningkatan Alokasi TKD oleh pemerintah pusat yang menyesuaikan dengan

kebutuhan penggajian, penanganan sosial, dan pemulihan ekonomi daerah yang membaik.

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) menurut penelitian dari Novi Al adalah dana yang bersumber dari APBN yang di Alokasikan kepada daerah dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant*, artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan DAU adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Definisi ini sejalan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Novi., al, 2021).

Salah satu tantangan terbesarnya adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan kota ini. Infrastruktur yang meliputi jaringan transportasi, pasokan energi, akses terhadap air bersih, sanitasi dan teknologi informasi merupakan faktor kunci yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Aulia, dkk. 2024 : 57).

Infrastruktur dapat memberikan efek pada perekonomian dengan 2 cara ada dampak yang langsung dan dampak yang tidak langsung. Dampak yang langsung infrastruktur pada perekonomian yaitu dengan bertambahnya infrastruktur juga dapat meningkatkan output, sedangkan dampak tidak langsungnya terhadap PDRB adalah dapat melakukan kenaikan aktifitas

perekonomian yang mana mengakibatkan meningkatnya modal balik bagi pemerintah ataupun pihak swasta, serta dapat melakukan penterapan tenaga kerja yang dapat meningkatkannya output. Infrastruktur yang terkoordinir dapat menurunkan biaya produksi dan dapat meningkatkan produktifitas. (Iskandar & Nurani, 2019 : 57).

Infrastruktur yang memadai dan efisien bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga suatu katalis yang berdampak luas. Dalam konteks Sumatera Selatan, infrastruktur jalan yang memadai berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Atmaja and Mahalli, t.t.). Infrastruktur jalan yang berkualitas membantu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama, seperti perdagangan, industri manufaktur, dan sektor jasa. Jaringan transportasi yang baik memungkinkan kelancaran pergerakan barang dan manusia, mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal (Aulia et al., 2024 : 92).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2
Infrastruktur Jalan di Sumatera Selatan tahun 2006-2023 (km)

No	Tahun	Jalan
1.	2019	857.29
2.	2020	870.29
3.	2021	1.322.02
4.	2022	1.609.02
5.	2023	112.158

Sumber: Badan Pusat Statitisk

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penyebab naiknya infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada tahun 2019-2020 antara lain Kementerian PUPR meningkatkan kemantapan ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan dengan pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang bertujuan mempercepat waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas jalan utama di provinsi tersebut. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperbaiki akses jalan ke perumahan, sentra pasar, dan sentra produksi, serta mendukung pelayanan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga didorong oleh upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai kabupaten/kota, seperti peresmian puluhan proyek infrastruktur di Kabupaten Lahat yang didanai APBD Sumsel. Secara keseluruhan, peningkatan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada 2019-2020 didorong oleh kombinasi pendanaan pusat melalui SBSN dan Alokasi daerah dari APBD yang difokuskan pada percepatan konektivitas, pengurangan waktu tempuh, dan peningkatan pelayanan publik.

Naiknya infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada tahun 2021-2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai super prioritas, termasuk progres pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang mendukung konektivitas regional. Peresmian dan pembangunan empat jembatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada 2021-2022 menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, dengan pendanaan dari APBD Provinsi Sumsel. Kementerian PUPR juga menargetkan penyelesaian proyek jalan layang (flyover) di Kota Prabumulih pada 2022, yang merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan nasional di Sumsel. Secara keseluruhan, kenaikan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada 2021-2022 dipicu oleh prioritas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan pusat, pelaksanaan proyek strategis seperti jalan tol dan flyover, serta peningkatan pemeliharaan dan pembangunan jembatan yang signifikan.

Turunnya infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh masih adanya ruas jalan rusak dan rusak berat sepanjang 210,84 kilometer yang menjadi keluhan masyarakat, menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan belum optimal dan merata di seluruh wilayah Sumsel. Belum tersedianya infrastruktur penunjang ekspor-impor, seperti pelabuhan laut dalam, yang berdampak pada belum optimalnya pengiriman barang dan konektivitas ekonomi daerah. Permasalahan birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit menghambat investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun data menunjukkan kemantapan jalan secara keseluruhan meningkat, keluhan masyarakat dan kondisi jalan rusak yang masih luas menunjukkan

adanya ketimpangan dan tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Selatan. Singkatnya, turunnya kondisi infrastruktur jalan di Sumatera Selatan pada 2023 disebabkan oleh masih luasnya jalan rusak, pengurangan anggaran perbaikan di beberapa daerah, serta hambatan birokrasi dan kurangnya infrastruktur penunjang yang berdampak pada percepatan pembangunan jalan.

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan menjadi semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan komunikasi dan mobilisasi antar daerah. Semakin baik kondisi jalan di suatu daerah baik kualitas dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa antar wilayah. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Mobilitas penduduk dan modal cenderung akan menjadi semakin tinggi. Lebih jauh lagi, daerah-daerah sulit terjangkau atau terisolir akan menjadi terjangkau dan terbuka terhadap area lain.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki penduduk yang cukup banyak dengan kemajuan pembangunan dan perekonomian yang cukup pesat. Sumatera Selatan tersebut selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan dan perekonomian yang cukup drastis yang menyebabkan meningkatnya transportasi yang melalui kota-kota tersebut. Hal tersebut dapat terjadi jika prasarana infrastruktur jalan yang memadai untuk kelancaran lalulintas perekonomiannya.

Itulah yang melatar belakangi peneliti untuk membahas mengenai bagaimana suatu pertumbuhan jika dilihat dari Dana Alokasi Umum dan

infrastruktur jalan, bagaimana hubungan diantara kedua variabel tersebut dan bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dari penjelasan di atas maka judul yang peneliti tentukan adalah **“Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2006-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya pada penelitian ini Apakah ada Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2006-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah ada Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2006-2023.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu dalam bidang ekonomi dan menambah wawasan bagi akademisi mengenai Infrastruktur jalan terhadap Dana Alokasi Umum.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran sekaligus dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan mengkaji ulang penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan dalam memahami bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Infrastruktur Jalan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2006-2023.